

NAMA : Adzra Ati'iqah

NPM : 2413031056

KELAS : 2024 B

---

1. Keputusan PT Lestari Mineral untuk menggunakan pendekatan akuntansi konservatif dalam mengakui biaya lingkungan hidup jangka panjang menunjukkan bahwa manajemen lebih memilih untuk mengantisipasi potensi kerugian lebih awal daripada menunda pengakuannya. Dalam konteks Teori Positif Akuntansi, perilaku ini dapat dijelaskan melalui hipotesis biaya politik (political cost hypothesis). Perusahaan besar di sektor yang sensitif terhadap isu sosial dan lingkungan, seperti pertambangan, cenderung menghadapi tekanan politik yang tinggi dari pemerintah, aktivis, dan masyarakat. Dengan menampilkan laba yang lebih rendah melalui kebijakan konservatif, perusahaan dapat mengurangi sorotan publik, menurunkan risiko regulasi tambahan, dan memperlihatkan kepatuhan terhadap tanggung jawab sosial.

Selain itu, pilihan konservatif ini juga dapat dimotivasi oleh upaya manajemen untuk menjaga legitimasi sosial (Legitimacy Theory). Dalam industri yang berisiko tinggi terhadap isu lingkungan, manajemen berusaha menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan transparansi. Dengan mengakui biaya reklamasi lebih awal, perusahaan dapat membangun citra sebagai entitas yang bertanggung jawab dan peduli terhadap dampak lingkungannya. Hal ini tidak hanya membantu mempertahankan kepercayaan publik, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi positif dari regulator nasional yang sedang mengembangkan standar akuntansi berlandaskan nilai keberlanjutan. Namun, pendekatan konservatif ini juga memiliki potensi dampak terhadap stakeholders lain. Bagi investor, terutama investor asing yang berorientasi pada kinerja jangka pendek, laba yang lebih rendah dapat menurunkan daya tarik investasi dan mengurangi nilai pasar saham. Sementara itu, bagi pemerintah dan masyarakat, kebijakan ini justru memberi sinyal positif karena menunjukkan kepatuhan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi lain, jika tekanan dari investor asing meningkat, perusahaan bisa menghadapi konflik kepentingan antara kepatuhan sosial dan kepentingan ekonomi pasar global.

Dengan demikian, perilaku manajemen PT Lestari Mineral dalam memilih kebijakan akuntansi konservatif tidak hanya didorong oleh pertimbangan teknis, tetapi juga oleh

strategi politik dan sosial untuk menjaga legitimasi, mengelola tekanan eksternal, dan menyeimbangkan kepentingan antara pemangku kepentingan lokal dan global.

2. Jika saya sebagai seorang akuntan tekanan dari investor luar negeri yang menginginkan perubahan kebijakan akuntansi ke arah yang lebih agresif harus disikapi dengan berpegang pada prinsip etika profesi, terutama integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional. Mengubah metode pengakuan biaya lingkungan hanya demi menampilkan laba yang lebih tinggi akan menyalahi prinsip kejujuran dan penyajian wajar laporan keuangan. Dalam konteks kasus ini, akuntan seharusnya tetap mempertahankan pendekatan konservatif karena mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya serta mendukung nilai keberlanjutan dan transparansi yang sedang dikembangkan pemerintah Indonesia. Mengikuti tekanan investor tanpa dasar yang kuat bukan hanya melanggar etika profesi, tetapi juga dapat merusak reputasi dan legitimasi sosial perusahaan di sektor yang sensitif terhadap isu lingkungan seperti pertambangan.
3. Proses penetapan standar akuntansi tidak sepenuhnya bersifat teknis, tetapi sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik dari berbagai kelompok kepentingan. Dalam kerangka teori ekonomi politik akuntansi, standar akuntansi dipandang sebagai hasil kompromi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda, seperti pemerintah, asosiasi industri, investor, dan lembaga internasional. Masing-masing pihak berusaha mendorong aturan yang paling menguntungkan posisi ekonominya. Dalam konteks PT Lestari Mineral, pemerintah Indonesia sedang menyusun standar akuntansi nasional yang menekankan nilai keberlanjutan dan transparansi sosial, tetapi prosesnya dipengaruhi oleh tekanan politik dari asosiasi industri pertambangan yang ingin mempertahankan fleksibilitas pelaporan biaya lingkungan. Di sisi lain, investor luar negeri membawa tekanan ekonomi global dengan mendorong penerapan interpretasi IFRS yang lebih agresif demi menampilkan laba yang lebih besar. Situasi ini menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi dan politik bertemu dalam pembentukan kebijakan akuntansi, di mana hasil akhirnya bergantung pada kekuatan tawar menawar antar pihak yang terlibat. Contoh lain di tingkat global adalah pengaruh negara-negara besar terhadap IFRS. Misalnya, dalam proses konvergensi antara IFRS dan US GAAP, Amerika Serikat melalui

FASB sering menolak atau memperlambat adopsi IFRS penuh karena ingin mempertahankan kontrol terhadap standar domestiknya. Begitu juga dengan tekanan industri keuangan saat krisis 2008, yang mendorong pelonggaran aturan fair value accounting untuk menghindari penurunan besar pada laporan laba. Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa standar akuntansi tidak netral; ia adalah produk politik yang merefleksikan kepentingan ekonomi dan kekuasaan di balik proses pembuatannya.

4. Pendekatan berbasis prinsip (principles-based) seperti yang digunakan dalam IFRS menekankan pada kerangka konseptual dan tujuan laporan keuangan, memberikan ruang bagi pertimbangan profesional (professional judgment) dalam penerapannya. Pendekatan ini fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan berbagai kondisi bisnis, tetapi menuntut tingkat integritas dan kompetensi tinggi dari akuntan agar tidak disalahgunakan untuk manipulasi laporan. Sebaliknya, pendekatan berbasis aturan (rules-based) seperti dalam US GAAP bersifat lebih rinci dan spesifik, menyediakan panduan teknis yang ketat untuk setiap situasi. Pendekatan ini mengurangi ambiguitas dan meningkatkan konsistensi, tetapi sering kali menghasilkan laporan keuangan yang lebih legalistik dan kurang mencerminkan substansi ekonomi sebenarnya.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan berbasis prinsip (IFRS) lebih relevan diterapkan. Alasannya, Indonesia sudah mengadopsi IFRS melalui PSAK untuk meningkatkan daya saing global, transparansi, dan keterbandingan laporan keuangan internasional. Selain itu, fleksibilitas IFRS memungkinkan perusahaan menyesuaikan pelaporan dengan kondisi ekonomi nasional yang beragam. Namun, keberhasilan penerapan pendekatan ini sangat bergantung pada kualitas profesionalisme akuntan dan pengawasan etis agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, meskipun IFRS memberi ruang interpretasi, pendekatan ini sejalan dengan arah pembangunan akuntansi Indonesia yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan nilai-nilai profesional global.